



► PANDEMI COVID-19

Pemda Diminta Tegas Tegakkan Prokes

Jumali & Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

JAKARTA— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah agar tegas dalam menjalankan Perda Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) tanpa pandang bulu.



“Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum, dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Kebutuhan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas penanganan

Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dikutip dari situs resmi kepresidenan, Senin (16/11).

Jokowi berpesan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengendalian Covid-19 adalah hal penting. Jokowi tak mau kepala daerah tidak memberi contoh dan malah ikut berkerumun.

Pemda Diminta...

"Untuk membuat pengendalian Covid-19 menjadi berjalan efektif, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik bagi masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," kata Jokowi.

Di tengah pandemi, imbauan untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan sudah berkali-kali disampaikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19. "Dalam penanganan Covid-19, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," ucap Jokowi.

Klaster Ponpes

Sementara itu, sebanyak 83 santri putri di pondok pesantren Islamic Centre Bin Baz, Piyungan, Bantul, reaktif saat dilakukan *rapid test* massal, Senin.

Dinas Kesehatan Bantul kemudian menguji *swab* ke santri yang reaktif dengan menggunakan mobil *polymerase chain reaction*

(PCR) yang telah disediakan. "Dari jumlah 83 santri putri yang reaktif ini bisa saja bertambah. Sebab ada 40 yang masih menunggu hasil. Sedangkan total peserta *rapid test* hari ini [kemarin] ada 700 santri putri," kata Sekda Bantul Helmi Jamharis.

Selain santri putri, Helmi mengungkapkan masih ada sebanyak 3.000 santri putra yang rencananya di-*rapid test* untuk mencegah penularan Covid-19 di pondok pesantren tersebut.

"Ini upaya kami menelusur dan mencegah terjadinya klaster di pondok pesantren. Saat ini kami memang sedang fokus ke pondok pesantren lebih dulu," ujar Helmi.

Mengenai langkah untuk santri yang nantinya dinyatakan positif di Bin Baz, Pemkab Bantul, kata Helmi telah berkoordinasi dengan pengelola pondok. Telah ada ruang khusus di lingkungan pondok untuk isolasi bagi santri yang positif Covid-19. "Akan disendirikan. Kali ini pengelolaan lebih terstruktur," lanjutnya.

Menurut Helmi, meski berpotensi menjadi zona merah karena banyaknya santri yang reaktif dan masih ada santri belum di-*rapid test*, sampai saat ini Pemkab Bantul belum memutuskan menambah zona merah di wilayahnya.

Sejauh ini, Pemkab Bantul

baru menerapkan zona merah untuk Kecamatan Sewon dan Banguntapan.

"Piyungan sejauh ini masih belum. Kita lihat perkembangan yang ada," ucap Helmi.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, mengatakan pada Senin ada 67 penambahan kasus positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan pada 746 sampel dari 717 orang. Kabupaten Bantul mendominasi penambahan ini sebanyak 30 kasus. Sementara sebanyak 15 kasus dinyatakan sembuh.

Berty menjelaskan selain di Bantul penambahan kasus berdasarkan domisilinya berasal dari Kota Jogja (empat kasus), Gunungkidul (17 kasus), dan Sleman 16 kasus.

Dilihat dari riwayatnya, penambahan terdiri dari *tracing* kasus positif (19 kasus), *screening* pendidikan (12 kasus), *screening* karyawan kesehatan (satu kasus), periksa mandiri (tiga kasus), dan masih dalam penelusuran (32 kasus).

Adapun kasus sembuh berdasarkan domisilinya meliputi Bantul (11 kasus), dan Sleman (empat kasus).

Dari jumlah tersebut maka kasus aktif DIY saat ini sebanyak 831 kasus, dengan tingkat kesembuhan 79,43% dan tingkat kematian 2,44%. (JIBI/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005